

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan yang berlaku menjadi dasar penerapan tata kelola yang baik merupakan komponen penting dalam menjalankan kegiatan usaha di era globalisasi dan kompleksitas bisnis saat ini. Dalam upaya mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia, ditegaskan bahwa setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 2 No. 47 Tahun 2012¹. Lebih lanjut peraturan tersebut menjelaskan bahwa setiap perusahaan, sebagai perwujudan dari aktivitas manusia di bidang bisnis, berkewajiban untuk tetap menjaga hubungan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat. Tanggung jawab ini sesuai dengan nilai-nilai, norma, dan budaya masyarakat yang berlaku.

Tanggung jawab sosial perusahaan(TJSL) atau yang lebih dikenal sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebuah konsep yang mencakup promosi pembangunan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan melalui keterlibatan perusahaan (Astri, 2012). CSR dapat mencakup sejumlah kegiatan seperti sumbangan filantropi dan upaya pelestarian lingkungan dalam upaya melakukan praktik bisnis yang etis serta keterlibatan aktif dalam komunitas. Dalam konteks kebijakan publik di Indonesia, penerapan CSR oleh perusahaan-perusahaan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Peraturan ini mengharuskan setiap perseroan terbatas untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan pemerintah dan sebagai upaya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas (PT)

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam hal ini, CSR tidak hanya menjadi kewajiban moral tetapi juga kewajiban legal bagi perusahaan. Lahirnya kebijakan ini bertujuan untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan CSR dikarenakan program CSR memiliki peranan penting untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dengan adanya kebijakan ini, perusahaan memiliki panduan yang jelas mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus mereka penuhi, serta mekanisme pelaporan dan evaluasi yang transparan.

Perusahaan-perusahaan di sektor sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL atau CSR sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 74/2012 tentang perseroan terbatas (UU PT) di Indonesia ². Pelanggaran terhadap kewajiban ini akan mengakibatkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun pasal ini hanya mengacu pada perusahaan yang bergerak dalam sektor sumber daya alam, kenyataannya, CSR adalah tanggung jawab yang berlaku secara umum bagi perusahaan, tidak terbatas pada sektor sumber daya alam saja.

Dijelaskan lebih lanjut, penunaian tanggung jawab oleh (Octaviani, 2022). CSR tidak terbatas pada kewajiban etis, namun juga mencakup komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup, dan pelestarian lingkungan. Perusahaan dapat menjamin bahwa mereka beroperasi dalam batas-batas hukum dan menghindari potensi risiko atau hukuman dengan memprioritaskan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Mematuhi praktik tata kelola yang baik berdasarkan kebijakan PP No. 47 Tahun

² Pasal 5 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perseroan terbatas (UU PT) di Indonesia

2012 membantu menciptakan proses pelaksanaan program yang transparan, sistem manajemen risiko yang efektif, dan akuntabilitas di seluruh organisasi. Selain itu, dengan merangkul masyarakat dalam program CSR sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan, perusahaan dapat secara aktif berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan reputasi mereka di antara para pemangku kepentingan. Terlibat dalam inisiatif pembangunan ekonomi yang berkelanjutan membantu menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat sekitar.

Dengan membuat program pemberdayaan masyarakat, perusahaan dapat berkontribusi terhadap kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan. Akar kata “daya” adalah sumber dari konsep pemberdayaan, yang mencakup makna “kekuatan”. Istilah “pemberdayaan” merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris “empowerment”. Dalam konteks ini, konsep pemberdayaan mencakup pemberian daya kepada kelompok-kelompok yang kurang berdaya dan tidak memiliki kapasitas untuk hidup mandiri, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan obat-obatan (Hamid, 2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 mewajibkan adanya program CSR, karena menjalankan program pemberdayaan, perusahaan turut membantu pemerintah dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat, sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dan berkelanjutan. Pemberdayaan ini juga diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam kebijakan publik. Didasari oleh kebijakan tersebut program-program CSR yang dijalankan perusahaan benar-benar memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat yang dituju dan sejalan dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, sinergi

antara perusahaan dan pemerintah dalam pelaksanaan CSR akan semakin kuat dan berdampak positif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi.

Pemberdayaan masyarakat adalah tindakan sosial yang dilakukan oleh anggota masyarakat untuk mengorganisir diri mereka sendiri dalam rangka mengatasi masalah-masalah sosial atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial sesuai dengan sumber daya yang mereka miliki (Sumodiningrat, 2009). Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat menekankan pada pengembangan kemandirian dan pemberian otonomi kepada individu untuk mengatur kehidupannya. Sesuai dengan kebijakan publik yang menjadi acuan pada penelitian ini, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai bagian integral dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Kebijakan ini mendorong perusahaan untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pengembangan kapasitas masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang berdaya dan membutuhkan dukungan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Program pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh perusahaan melalui CSR tidak hanya bertujuan untuk membantu mengatasi masalah sosial, tetapi juga untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan kemandirian masyarakat, memberikan mereka keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola kehidupan mereka secara mandiri dan berkelanjutan.

Kehadiran kebijakan yang telah dirumuskan pemerintah ini adalah kerangka eksekusi program dan pengawasan yang memastikan bahwa perusahaan menjalankan program CSR mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam penelitian ini pemerintah yang dimaksud adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan atau yang selanjutnya disebut Bappedalitbang Kabupaten Klaten berfungsi sebagai *support* penegakan kebijakan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 dan pemerintahan Desa Juwiring berperan sebagai jembatan kepentingan perusahaan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tercipta sinergi yang optimal dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Dengan adanya kebijakan yang jelas dari pemerintah, diharapkan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif yang signifikan. Pemberdayaan ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih stabil dan sejahtera.

Pada penelitian ini, penulis mengambil studi kasus program CSR yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama di Desa Juwiring, Kabupaten Klaten. PT. Tirta Investama adalah perusahaan yang fokus pada produksi dan distribusi air minum kemasan di Indonesia. Merek unggulannya adalah AQUA, yang telah menempatkannya sebagai salah satu pemain utama di industri air minum dan kemasan (AMDK) sejak pendiriannya pada tahun 1973. Perusahaan ini memiliki fasilitas produksi tersebar di berbagai lokasi di Indonesia untuk menjamin ketersediaan air minum bagi konsumen. Disamping AQUA, PT. Tirta Investama juga mengelola merek lain seperti VIT, Mizone, dan Club, serta menghadirkan berbagai ukuran dan variasi air minum sesuai dengan preferensi konsumen.

PT. Tirta Investama dalam menjalankan bisnisnya berupaya untuk berkomitmen menjadi perusahaan keberlanjutan dengan cara menjadi kontributor pelestarian lingkungan. Upaya tersebut tercermin dalam berbagai inisiatif yang dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan produksi dan distribusi air minum mereka. PT. Tirta Investama menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan dan pelestarian lingkungan serta ketaatan pada kebijakan yang berlaku. Mereka aktif terlibat dalam inisiatif pengelolaan air, termasuk program konservasi sumber daya air dan upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih di berbagai komunitas yang membutuhkan.

Pada tahun 2022, PT. Tirta Investama mengusung sebuah program CSR sebagai wujud keterlibatan aktif perusahaan dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 yang ditujukan untuk memperkuat harmonisasi dalam pengelolaan kawasan sumber daya air di Sub DAS Pusur. Sub DAS pusur tersebut berada di dua kabupaten yaitu Boyolali dan Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Program tersebut telah berjalan selama enam bulan Mei 2022 – Oktober 2022. Pelaksanaan program ini dilatarbelakangi atas berkurangan tutupan lahan yang pada awalnya digunakan sebagai lahan pertanian. Pengurangan lahan tersebut dikarenakan alih fungsi lahan menjadi pemukiman, industri dan jalan. Kemudian, program ini juga disebabkan oleh belum maksimalnya upaya konservasi yang dilakukan pada lahan di sekitar target program CSR. Selain itu, belum optimalnya upaya integrasi program konservasi dengan program pemerintah desa atau kabupaten. Sehingga hal – hal yang perlu difokuskan untuk membenahi prihal tersebut yaitu lain pembenahan saluran irigasi, melakukan upaya konservasi lahan pertanian dengan metode pertanian yang berkelanjutan, dan perencanaan sistem integrasi penanaman yang yang terjadwal.

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan di Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Pemilihan lokasi ini didasari oleh kerusakan pada saluran irigasi dan pintu air di wilayah Kecamatan Juwiring. Kerusakan tersebut berdampak pada distribusi air yang tidak merata, menyebabkan ketidakseimbangan hingga ke wilayah hilir. Situasi distribusi air yang tidak merata mendorong PT. Tirta Investama untuk memfasilitasi pembentukan Forum Relawan Irigasi (FRI) yang didasarkan pada program CSR atas PP No. 47 Tahun 2012. FRI ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani pengguna air, camat, hingga kepala desa. Pembentukan FRI ini mendapatkan legitimasi melalui Peraturan Kepala Desa (Perkades) di tujuh desa di Kecamatan Juwiring, dengan tujuan mengelola saluran irigasi secara bersama-sama. Desa-desa yang terlibat meliputi Pundungan, Juwiring, Bulurejo, Kwarasan, Kaniban, Tanjung, dan Bolopleret. Pengesahan dilakukan pada 6 September 2022, dengan detail

dicantumkan dalam Perdes Desa Pundungan No. 1/2022, Juwiring No 1/2022; Bulurejo No 2/2022; Kwarasan No 1/2022; Kenaiban No 2/2022; Tanjung No 1/2022 dan Bolopleret No 3/2022 tentang Pengelolaan Irigasi di Wilayah Hilir Sub DAS Puser Kecamatan Juwiring. Kemudian, Perkades secara resmi diserahkan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Dinas PUPR-PSDA Kab Klaten.

Kondisi awal panjang saluran di enam desa sepanjang 34,702 m yang terdiri atas saluran primer 1,180 m, saluran sekunder 8,712 m, saluran tersier 24, 810 m. Dimana setelah diidentifikasi saluran irigasi yang kurang lancar 2,781 m (primer 50 m dan tersier 2,713 m). Melalui upaya gotong royong yang telah dilakukan oleh para relawan mereka dapat menormalisasikan kembali saluran irigaasi dengan capaian perbaikan saluran primer, sekunder, dan tersier sebanyak 3, 696 m (Primer 175 m, sekunder 1,200 m, tersier 2.321m). Kemudian, dengan sistem irigasi yang telah membaik PT. Tirta Investama melihat potensi yang besar pada lahan – lahan pertanian di sekitar Desa Juwiring. Dengan potensi yang ada PT. Tirta Investama berupaya mengadakan program pemberdayaan lahan pertanian dengan metode demplot pertanian di Desa Juwiring. Program pemberdayaan pertanian yang dilakukan di Desa Juwiring menggunakan metode demonstrasi plot demplot. Metode demplot merupakan bagian yang sangat vital dalam penyuluhan pertanian. Praktik ini digunakan oleh para penyuluh dengan tujuan menyajikan materi penyuluhan kepada petani secara efisien. Inti dari penerapan metode demplot adalah memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dimengerti, diterima, dan diaplikasikan oleh penerima pesan. Oleh karena itu, keberhasilan penyuluhan sangat tergantung pada pemilihan metode yang sesuai agar pesan dapat disampaikan dengan efektif kepada audiens.

Metode demplot yang dilaksanakan di Desa Juwiring yaitu dengan konsep *regenerative agriculture* yang ramah air dan menyimpan karbon. Pada dasarnya upaya penanaman dengan konsep *regenerative agriculture* dimaksudkan untuk mengurangi dampak buruk dari pertanian

konvensional seperti erosi tanah, penurunan tingkat air tanah, dan pelepasan gas rumah kaca. Di lapangan, konsep *regenerative agriculture* di Desa Juwiring mengadopsi sejumlah teknik yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah menerapkan metode pertanian organik Pertanian regeneratif, juga dikenal sebagai *regenerative agriculture*, adalah pendekatan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan mutu lahan pertanian dengan memulihkan dan menyegarkan seluruh ekosistem, termasuk tanah dan air.

Praktik pertanian ini fokus pada pengelolaan air, pemanfaatan pupuk, dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk menciptakan lingkungan pertanian yang sehat. Melalui penanaman dengan model *regenerative agriculture* pada Desa Juwiring, PT. Tirta Investama beserta segenap petani melakukan uji coba penanaman cabai, terong, oyong, dan berbagai jenis sayuran lainnya. Dalam pelaksanaannya upaya pemberdayaan masyarakat melalui konservasi lahan membutuhkan partisipasi aktif tak hanya dari pihak PT. Tirta Investama, akan tetapi perlu adanya kerjasama yang efektif dengan para aktor/*stakeholder* lainnya.

Melalui upaya pemberdayaan lahan pertanian, PT. Tirta Investama juga membentuk kelompok pemberdaya dengan struktur organisasi yang jelas dan efektif di dalam masyarakat di Desa Juwiring. Kelompok tersebut bernama Unit PAMOR yang terdiri atas unsur pemerintah (DKPP), produsen (Poktam Gempol, Poktan Juwiring, CV Kompak Barokah), dan pendamping petani (GP, KOMPAK, KMPK). Kelompok tersebut ditunjukkan untuk memperlancar upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Juwiring.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengidentifikasi proses program CSR melalui pemberdayaan masyarakat di Desa Juwiring tahun 2022. penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan CSR PT Tirta Investama berdampak terhadap pemberdayaan masyarakat yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Selain itu penulis juga tertarik untuk menganalisis dampak dari program CSR melalui pemberdayaan masyarakat di Desa Juwiring tahun 2022. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Dampak Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT. Tirta Investama terhadap Masyarakat Desa Juwiring, Kabupaten Klaten, Tahun 2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dari latar belakang diatas, maka dapat disusun rumusan masalah untuk penelitian ini, yaitu:

Bagaimana dampak pemberdayaan masyarakat Desa Juwiring yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama sebagai Program *Corporate Sosial Responsibility*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dari latar belakang diatas, maka dapat penulis susun sebuah inti tujuan penelitian untuk penelitian ini, yaitu:

Untuk menganalisis hasil dari dampak pemberdayaan masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT. Tirta Investama terhadap masyarakat Desa Juwiring, Kabupaten Klaten, Tahun 2022

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro dan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Instansi Pemerintahan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rekomendasi dan masukan bagi instansi, serta menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Klaten dalam pengembangan kebijakan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan.

b) Bagi Penulis

Hal ini menjadi cita-cita penulis untuk meneliti dan mengimplementasikan ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan di Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan. Materi ini akan digunakan untuk memperluas pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat.

1.5 Penelitian terdahulu

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi, baik dari segi teori maupun metode penelitian, sebagai landasan perbandingan dan dukungan. Referensi ini membantu peneliti untuk melakukan analisis lebih mendalam terkait teori yang sejalan dengan judul penelitian yang diangkat. Selain itu, hasil penelitian sebelumnya menjadi sumber informasi untuk menganalisis persamaan dan perbedaan antara dua penelitian, baik yang telah dilakukan sebelumnya maupun yang akan dilakukan nantinya. Informasi ini juga memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti-peneliti berikutnya.

Pertama, penelitian Ade Alfina (2023) yang berjudul “Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada PT. Sukses Mitra Sejahtera Desa Krandang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hasil implementasi Corporate Sosial Responsibility (CSR) PT. Sukses Mitra Sejahtera dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya melaksanakan pemberdayaan, PT. Sukses Mitra Sejahtera mengadakan program – program yang berfokus pada bidang lingkungan, kesehatan, dan sosial.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa PT Sukses Mitra Sejahtera telah secara efektif berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan mengkoordinasikan kegiatan longcore piling brick dan perbaikan kembali sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). PT SMS telah menerapkan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip model pemberdayaan perspektif Islam, yaitu keadilan, kesetaraan, partisipasi, penghargaan terhadap etos kerja, dan gotong royong.

Persamaan penelitian yang dilakukan Ade Alfina (2023) dengan penelitian yang telah dilakukan yaitu pada tujuan penelitian yang sama – sama ingin menganalisa hasil *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat dan juga menggunakan teori pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan partisipasi. Sehingga penelitian ini bisa menjadi referensi bagi penelitian yang telah dibuat untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kemudian, perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang telah dilakukan yaitu pada objek penelitian yang dilakukan di daerah yang berbeda, dimana penelitian sebelumnya dilakukan di Desa Krandang, Kabupaten Klaten sedangkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Juwiring, Kabupaten Klaten. Penelitian selanjutnya juga lebih terfokus pada hasil dari proses pemberdayaan masyarakat.

Kedua, penelitian yang dilakukan Syawaluddin Kurniawan (2023) “Implementasi Dana Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Program Pemberdayaan Masyarakat pada PT. Pertamina Refinery Unit II Kota Dumai Perspektif Ekonomi Syariah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa implementasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dalam program pemberdayaan masyarakat Pada PT. Pertamina RU II Kota Dumai perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat sebagai acuan untuk mengidentifikasi hasil dari proses pemberdayaan yang dilakukan oleh PT. Pertamina RU II di Kota Dumai. Disamping itu, penelitian ini juga menggunakan pandangan syariah terkait

penerapan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijalankan oleh PT. Pertamina. Pada realitanya program yang telah dilaksanakan sejalan dengan prinsip ekonomi Islam, di mana pelaksanaan kegiatan tersebut didasarkan pada nilai-nilai saling membantu atau ta'awun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program CSR yang telah dilaksanakan tidak hanya memberikan manfaat dalam bentuk dana bantuan, namun juga memberdayakan masyarakat melalui pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri di masa depan, meskipun tanpa bantuan dari PT Pertamina.

Persamaan penelitian Syawaluddin Kurniawan (2023) Penelitian yang telah dilakukan memiliki tujuan penelitian yang sama, yaitu sama-sama bertujuan untuk mengidentifikasi atau menginvestigasi penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penelitian yang akan dilakukan juga memiliki kesamaan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Sebaliknya, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek yang digunakan. Penelitian terdahulu dilakukan di Kota Dumai, sedangkan penelitian ini akan dilakukan di Desa Juwiring.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Muhammad Nurrachmadi (2022) dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat Muslim melalui Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Kasus CSR PT. Telkom Palangkaraya)". Tujuan dari penelitian ini mengidentifikasikan peran CSR PT Telkom Palangkaraya dalam memberdayakan masyarakat muslim dan menganalisis Kendala-kendala PT Telkom Palangkaraya dalam menjalankan CSR. Dalam menelaah CSR, peneliti juga menggunakan teori pemberdayaan masyarakat sebagai dasar penelitian. Dalam upaya mempersiapkan masyarakat untuk memperkuat kelembagaan masyarakat sehingga mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan, maka digunakan konsep pemberdayaan

masyarakat. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan dalam menjalankan program kemitraan dan Bina Lingkungan, tidak selalu mendapatkan hasil yang diharapkan. Terdapat penyelewengan fungsi tugas dan kekeliruan pemahaman CSR itu sendiri dari masyarakat Palangkaraya.

Persamaan penelitian Muhammad Nurrachmadi (2022) Penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan karena akan lebih berkonsentrasi pada peran perusahaan yang memiliki Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Persamaan dari penelitian juga ditemukan pada salah satu indikator teori yaitu penguatan lembaga kemasyarakatan dalam upaya mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Disisi lain, perbedaan penelitian ini berada pada objek yang digunakan dalam penelitian, penelitian sebelumnya dilakukan di Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, sedangkan penelitian yang telah dibuat dilakukan di Desa Juwiring Kabupaten Klaten. Dijelaskan lebih lanjut perbedaan kedua penelitian ini juga ada pada tujuan identifikasi *pemberdayaan masyarakat*, dimana penelitian telah dilakukan spesifik kepada kelompok masyarakat muslim sedangkan penelitian yang telah dilakukan mengidentifikasi masyarakat yang terdapat dalam program pemberdayaan konservasi lingkungan.

Keempat, penelitian yang dilakukan Karina Austrina Putri (2020) dengan judul “Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Semen Gresik (P2MSG) Dalam Mewujudkan Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Sebagai CSR PT. Semen Indonesia TBK Pabrik Tuban”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Program Pemberdayaan Masyarakat Semen Gresik (P2MSG) sebagai program baru perusahaan dalam mewujudkan program-program berbasis pemberdayaan masyarakat dengan berfokus di Desa Temandang. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan teori pemberdayaan masyarakat yang diiringi pemberdayaan masyarakat dengan model *development for community* dan teori strukturasi.

Pada keberjalanan program pendekatan ini menekankan peran sentral komunitas dalam proses pembangunan. Dalam kerangka model ini, anggota masyarakat didorong untuk secara aktif terlibat dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan yang mencerminkan kebutuhan mereka. Fokus utama dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan, merumuskan solusi, dan melaksanakan langkah-langkah yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dengan penerapan konsep *development for community*, masyarakat yang terdampak dapat merasakan perubahan sistem keorganisasian. Perubahan tersebut terletak pada kemandirian masing-masing desa dalam memiliki keorganisasiannya sendiri dan tidak lagi berkegantungan ditingkat kecamatan.

Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada tujuan penelitian peran perusahaan yang memiliki Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) terhadap pemberdayaan masyarakat dan indikator penguatan kelembagaan di masyarakat pada konsep teori pemberdayaan masyarakat. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang telah dilakukan terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian sebelumnya dilaksanakan di sekitar pabrik perusahaan PT. Semen Indonesia TBK Pabrik Tuban sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan terletak di Desa Juwiring, Kabupaten Klaten.

Kelima, penelitian yang dilakukan Yulia Risa (2020) dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial (Studi Kasus PT. Tirta Investama Plant Solok) di Nagari Batang Barus Kabupaten Solok”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan keterlibatan dan pelaksanaan pertanggung jawaban sosial (Corporate Social Responsibility) PT. Tirta Investama Pabrik Aqua Plant Solok dalam pemberdayaan masyarakat di Nagari Batang Barus Kabupaten Solok. Fokus penelitian utama dari penelitian ini adalah konsep pembangunan berkelanjutan dan manfaatnya bagi pemberdayaan masyarakat,

khususnya prinsip-prinsip dasar pertimbangan sosial, lingkungan, dan etika (triple bottom line). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan telah dilaksanakan secara efektif, menghasilkan pembangunan fasilitas air bersih dan sanitasi, serta pemetaan sosial. Kesimpulan ini diperoleh setelah dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam. PT Tirta Investama Danone Aqua telah melaksanakan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI) di bidang lingkungan, selain program sekolah lapang alpukat di bidang ekonomi. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan inisiatif CSR kedua PT Tirta Investama untuk mendukung pemberdayaan masyarakat di Nagari Batang Barus..

Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada penggunaan konsep pemberdayaan masyarakat untuk melakukan TJSL yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang telah dilakukan terletak pada objek dan penelitian.

1.6. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Kebijakan Publik

Dalam bidang kebijakan publik, definisi yang digunakan untuk membahas kebijakan sebagai sumber dari dilaksanakannya program sangat penting. Salah satu teori yang relevan dalam hal ini adalah teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N. Dunn. Dalam bukunya "Public Policy Analysis; an Introduction" (2003), Dunn mendefinisikan kebijakan publik sebagai pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik tidak hanya mencakup tindakan yang diambil oleh pemerintah, tetapi juga keputusan untuk tidak bertindak. Kebijakan publik adalah hasil dari proses yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan yang berinteraksi satu sama lain. Proses ini mencakup identifikasi masalah, perumusan kebijakan,

implementasi, dan evaluasi, yang semuanya saling berhubungan dan mempengaruhi hasil akhir kebijakan.

Dalam konteks program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT. Tirta Investama di Desa Juwiring, kebijakan publik ini dapat dilihat sebagai upaya kolektif untuk mencapai tujuan pembangunan sosial dan ekonomi di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, perusahaan diwajibkan untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan di wilayah operasinya. Teori Dunn memberikan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana program CSR ini dirancang dan diimplementasikan untuk memberdayakan masyarakat Desa Juwiring. Program ini bukan hanya sekadar inisiatif perusahaan, tetapi juga bagian dari kebijakan publik yang lebih luas yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan perusahaan itu sendiri. Melalui pendekatan ini, kita dapat memahami bahwa kebijakan CSR oleh PT. Tirta Investama adalah bagian dari pola ketergantungan yang kompleks, di mana berbagai pilihan dan keputusan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan bersama.

Dengan demikian, teori kebijakan publik menurut William N. Dunn memberikan perspektif yang penting dalam menganalisis dan memahami dampak program CSR terhadap pemberdayaan masyarakat. Ini membantu kita untuk melihat bagaimana keputusan kolektif yang diambil oleh berbagai pihak dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat dievaluasi dan disesuaikan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

1.6.2 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep yang mencakup dua pendekatan utama yaitu pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*). Menurut (Chambers, 1995) esensi pemberdayaan

terletak pada kemanusiaan. Dengan kata lain, masyarakat menjadi ukuran normatif, struktural, dan substansial. Konsep ini mengutamakan pendekatan yang berfokus pada masyarakat yang partisipatif dan berkelanjutan.

Sejalan dengan pernyataan tersebut menurut (Mardikanto, 2013) Dalam upaya untuk memungkinkan individu dan organisasi dalam masyarakat untuk secara mandiri meningkatkan kualitas hidup mereka dan mengatasi tantangan yang mereka hadapi, konsep pemberdayaan masyarakat diperkenalkan. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mencakup komponen ekonomi tetapi juga komponen sosial dan lingkungan. Berikut adalah rincian indikator-indikator yang menjadi fokus dalam teori pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto yaitu:

1. Bina Manusia

Upaya awal dan paling penting dalam setiap inisiatif pemberdayaan adalah pengembangan manusia, karena manusia adalah pelaku atau pengelola manajemen itu sendiri. Fokus utamanya adalah pada pengembangan kapasitas individu dan kelompok dalam masyarakat, termasuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran akan potensi dan hak-hak mereka.

2. Bina Usaha

Bina usaha berorientasi pada perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ini termasuk dalam memfasilitasi pembentukan usaha-usaha produktif, memberikan pelatihan kewirausahaan, dan mendukung pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

3. Bina Lingkungan

Pengelolaan lingkungan tidak hanya mencakup lingkungan fisik, tetapi juga lingkungan sosial yang mempengaruhi kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. Ini termasuk dalam upaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan fisik seperti

infrastruktur dan akses layanan, serta memperkuat jaringan sosial dan kerjasama antarwarga.

4. Bina Kelembagaan

Bina kelembagaan merujuk pada pembentukan dan penguatan kelembagaan sosial atau organisasi masyarakat yang dapat mendukung terselenggaranya bina manusia, usaha, dan lingkungan. Suatu kelembagaan dikatakan efektif jika memenuhi empat komponen penting, yaitu komponen person (anggota), komponen kepentingan (tujuan), komponen aturan (tata tertib), dan komponen struktur (organisasi internal).

1.6.2 Dampak Pemberdayaan Masyarakat

Menurut (Zubaedi, 2016) pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang kurang beruntung agar dapat melampaui keadaan mereka. Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk mendukung peningkatan kemampuan masyarakat dengan mendorong, menyadarkan, dan memotivasi mereka agar menyadari potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Sejalan dengan pernyataan tersebut (Khan, 1997) mendefinisikan tujuan dari diadakannya pemberdayaan adalah untuk menciptakan individu dan masyarakat yang lebih mandiri. Melalui pemberdayaan masyarakat, terciptanya kemandirian dapat mengantarkan mereka menuju kebebasan berpendapat, kebebasan bertindak, dan kebebasan untuk mengatur apa yang mereka lakukan. Pada pemberdayaan masyarakat menurut (Khan, 1997) terdapat dimensi dan indikator dampak pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Masyarakat sebagai subjek pembangunan

Untuk dapat memaksimalkan dampak pemberdayaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada desa yang diberdayakan, perusahaan tersebut harus memberikan perhatian utama pada keterlibatan aktif dan pemahaman menyeluruh terhadap kebutuhan, aspirasi, dan kapasitas masyarakat saat

melakukan intervensi. Dengan menganggap masyarakat sebagai pusat pembangunan, sebuah perusahaan yang memiliki tugas tanggung jawab sosial dapat merancang program pemberdayaan yang lebih sesuai, berlanjutan, dan memiliki dampak positif yang penting bagi penduduk Desa Juwiring. Indikator dimensi masyarakat sebagai subjek pembangunan meliputi:

a. Partisipasi

Keterlibatan aktif masyarakat pada setiap fase pembangunan menjadi elemen kunci keberhasilan mencapai tujuan bersama. Melibatkan mereka secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan evaluasi hasil dari berbagai kebijakan pembangunan. Tujuannya adalah memastikan representasi dan perhatian yang memadai terhadap kepentingan serta aspirasi masyarakat.

b. Desentralisasi

Melalui desentralisasi, masyarakat Juwiring sebagai target utama yang diberdayakan memperoleh kebebasan untuk mengelola sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka sendiri. Ini membuka potensi pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan pemenuhan hak-hak dasar.

c. Demokrasi

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, pengambilan keputusan yang tidak memihak, kebebasan berekspresi, dan perlindungan hak asasi manusia merupakan indikator demokrasi. Dengan memperhatikan indikator demokrasi, sebuah perusahaan yang memiliki tugas tanggung

jawab sosial dapat memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan.

d. **Transparansi**

Indikator transparansi penting untuk memastikan bahwa proses pembangunan berjalan dengan adil dan terbuka. Transparansi melibatkan kemudahan akses informasi, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya publik. Dengan adanya transparansi, masyarakat yang diberdayakan dapat berperan aktif dalam proses pembangunan, sehingga kepentingan mereka akan diakui dan dilindungi.

e. **Akuntabilitas**

Setiap wewenang yang telah diberikan harus menyertakan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dilaksanakan. Upaya pertanggungjawaban yang baik, dapat menunjukkan dedikasi dan profesionalisme perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial dalam menjalankan tugas-tugas pemberdayaan yang telah dilakukan kepada masyarakat yang dituju. Proses ini membantu memastikan bahwa setiap keputusan atau tindakan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan standar kerja yang tinggi oleh para pihak – pihak pemberdaya. Hal tersebut dilakukan dengan harapan agar kedepannya program yang telah terlaksana dapat ditinjau kembali, sehingga dapat menghasilkan hasil yang maksimal.

2. Penguatan kelembagaan masyarakat

Melalui penguatan kelembagaan, masyarakat dapat lebih efektif dan aktif dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan politik.

Kelembagaan yang kokoh akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya dan dapat memaksimalkan sumberdaya tersebut dengan baik. Selain itu, kelembagaan yang kuat juga berperan dalam melindungi hak-hak warga negara dan memastikan partisipasi mereka yang aktif dalam proses pengambilan keputusan.

a) Pembentukan dan penguatan kelembagaan

Upaya pembentukan dan penguatan kelembagaan dibutuhkan untuk memperkuat struktur dan kapasitas lembaga-lembaga di masyarakat. Indikator ini meliputi proses pembentukan lembaga baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat kolaborasi antar masyarakat di sekitar kawasan target pemberdayaan yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki tugas tanggung jawab sosial.

b) Pelatihan bagi pengelola dan masyarakat

Pelatihan dapat membantu sebuah perusahaan yang memiliki tugas tanggung jawab sosial untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas masyarakat dalam mengelola kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya di lingkungan mereka.

1.7. Operasionalisasi Konsep

a. Kebijakan Publik

Program CSR yang diinisiasi PT. Tirta Investama merupakan respons terhadap pola ketergantungan yang kompleks antara keputusan kolektif dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat Desa Juwiring dalam upaya mencapai tujuan pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif. Program ini tidak hanya mencakup keputusan untuk bertindak,

tetapi juga keputusan untuk tidak bertindak terhadap berbagai masalah yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Keputusan-keputusan ini tercermin dalam alokasi sumber daya dan strategi implementasi yang dipilih.

Proses perumusan kebijakan CSR melibatkan interaksi kompleks antara perusahaan, pemerintah lokal, dan masyarakat Desa Juwiring. Ini melibatkan identifikasi masalah bersama, negosiasi kepentingan, dan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan yang beragam dari semua pihak terlibat.

PT. Tirta Investama bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat Desa Juwiring untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang perlu diatasi melalui program CSR. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap konteks lokal dan strategi pembangunan yang berkelanjutan.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Teori strategi pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Mardikanto (2013) bertujuan untuk memaksimalkan upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama kepada Desa Juwiring. Dalam teori yang diungkapkan oleh Mardikanto terdapat empat indikator untuk memaksimalkan hasil pemberdayaan yaitu:

1. Bina Manusia

Menggelar kampanye pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk mengimplementasikan kampanye tersebut PT. Tirta Investama mengadakan pelatihan *regenerative agriculture* secara berkala bagi petani di Desa Juwiring untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam praktik pertanian yang berkelanjutan.

2. Bina Usaha

Bina usaha mengarah pada peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui diversifikasi usaha pertanian. Selama proses pemberdayaan berlangsung PT. Tirta Investama menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan bagi petani dan masyarakat Desa Juwiring untuk mengembangkan usaha-usaha pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan serta membantu dalam penyediaan akses ke modal dan pendanaan bagi petani untuk meningkatkan ilmu pertanian mereka.

3. Bina Lingkungan

Melakukan pembenahan saluran irigasi dan drainase di area pertanian Desa Juwiring untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan lingkungan dan mengadakan kegiatan sosial dan pertemuan komunitas untuk memperkuat kerjasama antar petani dan membangun solidaritas dalam mendukung praktik pertanian yang berkelanjutan.

4. Bina Kelembagaan

Memperkuat kelembagaan kelompok tani yang efektif dan berdaya guna, dengan tujuan untuk saling mendukung dalam praktik pertanian regeneratif dan memperoleh manfaat bersama.

c. Dampak Pemberdayaan Masyarakat

Teori dampak pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh (Khan, 1997) bertujuan untuk menciptakan kemandirian pada individu dan masyarakat. Dimana tujuan tersebut dapat tercipta dengan adanya upaya pelibatan masyarakat dalam setiap prosesnya, dengan harapan mereka dapat mencapai kebebasan berpendapat, kebebasan bertindak, dan kebebasan untuk mengatur tindakan mereka. Dalam teori yang diungkapkan oleh Khan,

terdapat dua indikator yang menjadi landasan untuk mengukur dampak keberhasilan pemberdayaan, yaitu:

1. Masyarakat sebagai subjek pembangunan

- a. Partisipatif, dimana warga Desa Juwiring yang berpartisipasi aktif dalam program CSR dapat memberikan masukan dan ide dalam forum yang diwadahi oleh Pemerintah Desa Juwiring yang berkolaborasi dengan PT. Tirta Investama. Selanjutnya, pihak - pihak PT. Tirta Investama dapat mendengarkan pendapat mereka dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan kondisi desa.
- b. Desentralisasi, melalui desentralisasi masyarakat diberikan sebagian tanggung jawab dalam program CSR kepada organisasi atau lembaga setempat. Tujuannya adalah agar program lebih sesuai dengan kebutuhan dan budaya lokal. Tanggung jawab tersebut berupa upaya memaksimalkan sumber daya yang ada seperti lahan pertanian dan saluran irigasi untuk digunakan sebagai pendukung keberjalanan pemberdayaan yang berfokus kepada bidang pertanian.
- c. Demokrasi, dalam hal ini demokrasi setiap aktor dalam program ini memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan mengungkapkan pendapat mereka. Keputusan diambil secara bersama-sama antara perusahaan, pemerintah setempat, dan masyarakat Desa Juwiring.
- d. Transparansi, PT. Tirta Investama mengungkapkan secara transparan kegiatan yang mereka lakukan dalam program Corporate Social Responsibility (CSR). Selain itu, mereka juga menginformasikan

kepada masyarakat mengenai jumlah dana yang digunakan dan hasil yang diharapkan dari program tersebut.

- e. Akuntabilitas, PT. Tirta Investama harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil dalam program Corporate Social Responsibility (CSR). Wujud dari pertanggung jawaban tersebut adalah dalam pemberian pembinaan program yang berkelanjutan untuk masyarakat dan laporan yang harus diberikan kepada seluruh partisipan dan khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten sebagai pengawas CSR di Kabupaten Klaten.

2. Penguatan Kelembagaan Masyarakat

- a. Pembentukan dan penguatan kelembagaan

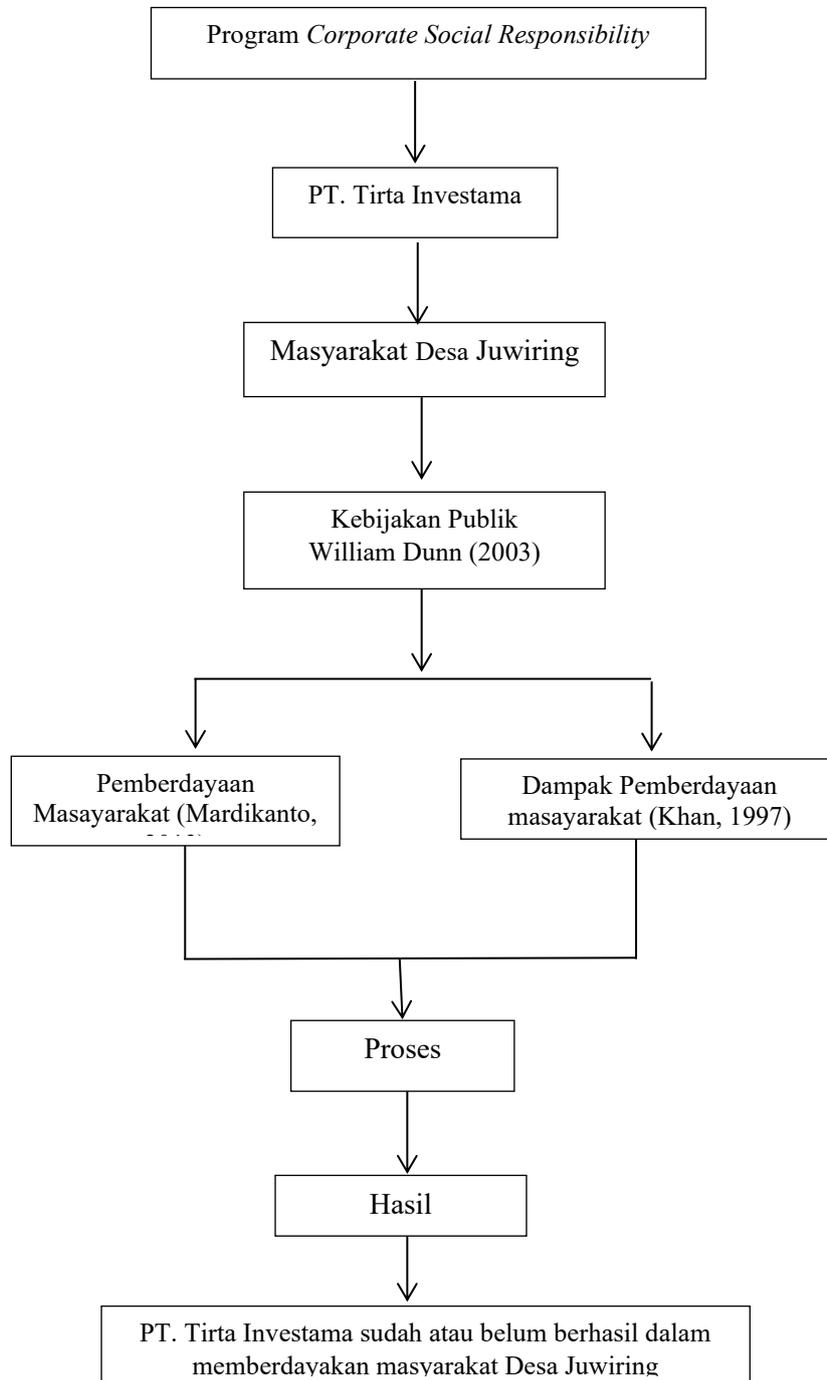
Dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Juwiring, PT. Tirta Investama harus berkomitmen untuk mendukung pembentukan atau penguatan lembaga lokal di Desa Juwiring. Hal ini dilakukan dengan cara menguatkan partisipasi keanggotaan kelompok – kelompok pertanian masyarakat yang ikut andil dalam program pengelolaan pertanian. Melalui partisipasi keanggotaan yang kuat, mereka akan memberikan bantuan dalam merancang peraturan dan melatih anggota kelompok mereka kembali agar dapat mengelola program Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah terlasana dapat berjalan dengan berkelanjutan

- b. Pelatihan bagi pengelola dan masyarakat

Pemberian pelatihan kepada para pengelola program Corporate Social Responsibility (CSR) bertujuan untuk membantu mereka mengelola proyek dengan lebih baik dan berkomunikasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian pelatihan juga dapat memperkuat kompetensi teknis dan keterampilan kepada yang diberdayakan.

1.7.2 Kerangka Konseptual

Gambar 1. 1 Kerangka konseptual



1.8. Metode Penelitian

Menurut (Creswell, 2016), Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami arti penting dari pengalaman individu atau kelompok dalam kaitannya dengan isu-isu sosial. Metode penelitian ini sangat berguna untuk menggali pemahaman tentang kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku manusia, konsep atau fenomena tertentu, serta berbagai masalah sosial yang relevan. Melalui dengan pendekatan ini, hasil penelitian dapat memuat wawasan yang mendalam dan akurat mengenai dinamika dan tantangan sosial yang dihadapi oleh beberapa orang atau komunitas secara menyeluruh.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi salah satu alat utama dalam pengumpulan data primer. Dengan keahliannya sendiri atau dengan bantuan orang lain, peneliti memiliki peran penting dalam mengumpulkan data yang berkualitas dan mendalam. Hal Ini menunjukkan bahwa peneliti adalah sumber informasi yang berharga dan dapat diandalkan dalam proses penelitian. Menurut (Moelong, 2007) laporan hasil penelitian telah memuat kutipan-kutipan data yang relevan untuk memberikan landasan yang kuat dalam penyajian laporan. Naskah wawancara, catatan lapangan, foto, rekaman video, dokumen pribadi, catatan atau memorandum, dan dokumen resmi lainnya merupakan beberapa sumber yang dapat digunakan untuk memperoleh data..

Dengan memasukkan data-data tersebut ke dalam penelitian, hasil data telah memberikan kejelasan dan keotentikan yang dibutuhkan untuk mendukung temuan penelitian.

1.8.1 Desain Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis hasil dari proses pemberdayaan masyarakat Desa Juwiring, yang dilakukan oleh PT Tirta Investama sebagai Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Oleh karena itu, pendekatan studi kasus merupakan metode yang tepat untuk penelitian ini.

Menurut (Yin, 2009) Penelitian studi kasus merupakan pilihan yang sangat baik untuk menjawab pertanyaan penelitian seperti “bagaimana” atau “mengapa”. Metode ini dapat

menjadi solusi ideal untuk melakukan penelitian secara tepat waktu dan efektif, terutama ketika peristiwa yang diteliti berada di bawah kontrol yang terbatas. Penekanannya adalah pada fenomena kontemporer untuk memantau peristiwa kontemporer. Peneliti berkonsentrasi pada desain dan pelaksanaan penelitian dalam metode studi kasus.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Situs atau lokasi penelitian memegang peranan penting dalam keberhasilan sebuah penelitian. Dengan memilih lokasi yang tepat, peneliti telah dapat mengumpulkan informasi yang akurat dan relevan dengan fokus serta tujuan dari penelitian tersebut. Lokasi yang menjadi objek penelitian adalah Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten.

1.8.3 Subjek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada partisipasi individu yang diminta untuk menyampaikan informasi terkait fakta atau pandangan pribadi mereka. Menurut (Arinkunto, 2017), subjek penelitian dapat mencakup objek, hal, atau individu yang memiliki data terkait variabel penelitian dan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, terdapat 6 subjek penelitian, yaitu:

Tabel 1.1 Profil informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Jabatan
1	Ika Kesaktian Putri	Perempuan	28	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Juwiring
2	Sri Sugiarti	Perempuan	64	Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Desa Juwiring
3	Edy Sumarsono	Laki – Laki	68	Ketua Kelompok Tani (POKTAN) Desa Juwiring
4	Titin Marliyanan	Perempuan	26	NGO Gita Pertiwi
5	Rama Zakaria	Laki – Laki	50	Manager CSR PT Tirta Investama Klaten
6	Sutrisno, S.T., <u>M.Si</u>	Laki – laki	50	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

(Sumber: Diolah Melalui Data di Lapangan)

1.8.4 Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang akan digunakan dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1.8.4.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya oleh peneliti. Menurut (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 2018) Data primer adalah informasi yang langsung dikumpulkan oleh peneliti melalui metode observasi, survei, wawancara, percobaan, atau sumber data lainnya yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Untuk investigasi ini, data akan dikumpulkan dari banyak informan. Dimana proses penggalian data dilakukan melalui wawancara

pihak PT. Tirta Investama, NGO Gita Pertiwi. Pemerintah Desa Juwiring, Pengurus POKTAN, Pengurus KWT, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Klaten.

1.8.4.2 Data Sekunder

Peneliti memperoleh data sekunder secara tidak langsung. Data sekunder berfungsi sebagai informasi pelengkap dari data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelaahan terhadap isi dari berbagai sumber bacaan dan publikasi penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi peraturan pemerintah dan peraturan perundangan yang terkait dalam bentuk Perseroan Terbatas yang memiliki tugas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), literatur mengenai metodologi penelitian, dan pemberdayaan masyarakat.

1.8.5. Pengumpulan Data

1.8.5.1 Wawancara

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah salah satu metode menggali informasi secara komprehensif. Metode ini melibatkan pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan yang mendalam dan terperinci kepada responden. Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat bertukar informasi dengan responden untuk mengeksplorasi pemikiran, perasaan, dan pengalaman responden secara lebih rinci (Sugiyono, 2015). Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami latar belakang, sudut pandang, dan konteks dari jawaban yang diberikan oleh responden.

1.8.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat bagi peneliti kualitatif untuk menggambarkan perspektif subjek dengan cara yang jelas dan nyata. Melalui metode dokumentasi peneliti dapat secara akurat memvisualisasikan pandangan dan pengalaman yang diteliti.

Dalam (Sugiyono, 2015) dokumentasi adalah rekaman peristiwa masa lalu, baik berupa gambar, tulisan, atau karya terdahulu seseorang. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi dapat memberikan pemahaman mendalam tentang konteks dan kompleksitas dalam studi kualitatif.

1.8.5.3 Studi Pustaka

Studi kepustakaan dapat menggali berbagai literatur yang tersedia, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, dan sumber-sumber lainnya. Adapun menurut (Darmalaksana, 2020) melalui studi kepustakaan peneliti dapat mengumpulkan baik sumber kepustakaan primer maupun sekunder.

1.8.6. Analisis dan Interpretasi Data

Membaca data yang diteliti harus melalui proses analisis dan interpretasi data. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah proses penarikan konklusi dan kesimpulan pada data yang diteliti. Menurut (Himawan, 2020) Tiga untaian kegiatan yang terjadi secara bersamaan dapat digunakan untuk mengkategorikan analisis interpretasi data. Tiga segmen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan perumusan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi mengelola informasi. Dalam proses ini, data di simplifikasi dan dipilih berdasarkan yang paling relevan. Dengan melakukan reduksi, kita memastikan hanya data yang paling penting yang tetap ada, sementara yang kurang relevan dapat dihilangkan dengan bijak.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penelitian kualitatif mencakup berbagai komponen penting, seperti analisis hubungan antar kategori, deskripsi ringkas, dan grafik. Penelitian kualitatif menggunakan data kontekstual dan relevan untuk menyajikan temuan dengan cara yang lebih komprehensif dan mendalam. Uraian singkat dalam penelitian kualitatif berfungsi

untuk memberikan gambaran umum mengenai temuan dan interpretasi data. Peneliti menyertakan deskripsi yang rinci tentang konteks dan latar belakang penelitian, serta penjelasan mengenai proses pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

3. Penarikan simpulan (*Data Conclusion*)

Kesimpulan dari sebuah penelitian adalah titik akhir yang mencerminkan perspektif utama peneliti, yang berasal dari informasi yang telah dikumpulkan dan hasil analisis yang menyeluruh. Kesimpulan ini berfungsi sebagai ringkasan komprehensif dari temuan utama yang telah diidentifikasi selama proses penelitian, memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang telah dicapai dan dipelajari. Sebuah kesimpulan yang tepat harus selaras dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan di awal, serta mengintegrasikan temuan-temuan yang telah dianalisis dengan seksama.

Selain itu, kesimpulan mencakup implikasi dari temuan tersebut, baik dalam konteks teoretis maupun praktis. Ini berarti bahwa kesimpulan tidak hanya menyajikan hasil akhir, tetapi juga menghubungkannya dengan pertanyaan penelitian dan hipotesis awal, memberikan penjelasan mengenai bagaimana hasil tersebut mendukung atau menolak hipotesis.

1.8.7. Kualitas Data

Mutu dari hasil penelitian sangat bergantung pada kebenaran dan keakuratan data yang diperoleh. Data yang valid dan akurat menjadi pondasi utama dalam menentukan kredibilitas suatu penelitian. Dengan menggunakan data yang benar, hasil penelitian akan menjadi lebih meyakinkan dan dapat diandalkan oleh masyarakat ilmiah maupun praktisi di bidang terkait. Untuk menguji kualitas data maka harus dilakukannya validitas data. Dalam penelitian atau analisis apa pun, validitas adalah hal yang sangat penting. Proses pengumpulan data yang tepat dan akurat diperlukan untuk memastikan tingkat validitas data yang paling tinggi. Triangulasi data merupakan salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan validitas

data. Triangulasi data adalah proses memperoleh dan menganalisis data dari berbagai sumber atau perspektif untuk menjamin keakuratan dan keandalan informasi.

Menurut Menurut (Sugiyono, 2015) Triangulasi data adalah metode pengumpulan data yang mengintegrasikan berbagai data dan sumber yang ada. Oleh karena itu, dengan penggunaan teknik triangulasi peneliti dapat mengevaluasi studi yang akan diteliti bersamaan dengan membandingkan berbagai sumber, pendekatan, dan teori lainnya.